

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Teori Sistem dan Proses Rekrutmen

1.1.1. Pengertian Sistem Rekrutmen

Menurut Ludwig Von Bertalanffy, sistem adalah sekumpulan unsur yang berada dalam keadaan berinteraksi dan menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan suatu sistem yang ditemui dalam masyarakat yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan sedangkan fungsi adaptasi merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.¹

Rekrutmen adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh partai politik untuk mencari sumber daya manusia (*human Resources*) guna dilibatkan dalam aktivitas partai politik, baik sebagai anggota, pengurus partai maupun untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Dari

¹ Toni Andrianus Pito, dkk. (2013). *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendikia. Hal.43-46

dua pengertian tersebut, ada dua dimensi dari rekrutmen. *Pertama*, dimensi internal, yakni bahwa rekrutmen menyangkut soal bagaimana partai mencukupi ketersediaan SDM guna keberlanjutan eksistensinya. *Kedua*, pada hakekatnya, partai politik lahir dan dikonstruksikan sebagai milik publik. Konsekuensinya, partai bertanggung jawab menyediakan ruang bagi publik luas untuk terlibat dalam aktivitas partai politik.²

Eksistensi anggota penting bagi kehidupan partai politik dalam keberhasilan maupun kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya, tergantung seberapa mampu partai politik menyediakan ruang bagi eksistensi anggotanya. secara umum, rekrutmen yang dilakukan partai politik, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rekrutmen anggota baru, rekrutmen anggota pengurus partai dan rekrutmen jabatan-jabatan politisi atau publik. Dalam hal ini, proses rekrutmen membutuhkan eksistensinya untuk persyaratan formal tertentu yang harus di penuhi oleh calon anggota dan calon pejabat publik ataupun politik tertentu. Prasyarat formal ini dibentuk dan diakui bersama oleh semua komponen dalam partai politik.³

Menurut Miftah Thoha dalam buku kebijakan publik yang membumi mengatakan bahwa ada dua sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen. *Pertama*, sistem patronik (*patronage system*),

² Miriam Budiardjo. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hal. 162

³ Suharlin. (2019). *Analisis Sistem Rekrutmen Dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Hal. 16. Diakses Kamis 20 Oktober 2022 dari Universitas Baturaja.

sistem ini di kenal dengan sistem kawan, karena dasar pemikirannya melalui proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat dan keluarga. Sistem kawan ini juga berdasarkan perjuangan politik karena memiliki satu pemikiran yang sama. *Kedua*, sistem merit (*merit system*) sistem ini berdasarkan kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Penilaian objektif tersebut pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan.⁴

1. Sistem kawan (*Patronage system*)

Sistem kawan merupakan sistem keanggotaan yang bersifat subjektif, artinya pengangkatan seorang anggota berdasarkan atas hubungan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan pihak yang diangkat. Sistem ini dibedakan antara yang bersifat politis dengan yang bersifat non-politis. Sistem yang bersifat politis dikenal dengan istilah *Spoil system* dimana menganut sistem dwipartai politik. Pengangkatan anggota berdasarkan atas keanggotaan partai terhadap kemenangan partainya. Dan yang bersifat non-politik yaitu *nepotisme system* dimana dalam praktik pengangkatan anggotanya didasarkan keluarga, kawan yang akrab atau teman baik.

⁴ Rudi Saputra. (2018). Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda). *Skripsi fakultas ilmu politik dan ilmu sosia UIN Syarif Hidayatullah*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44487>. Diakses pada hari kamis 1 September 2022.

2. Sistem kecakapan (*merit system*)

Berbeda dengan sistem kawan, sistem kecakapan ini bersifat objektif. Pengangkatan seorang anggotanya berdasarkan pada kecakapan yang dimiliki. Ukuran awal untuk mengetahui kecakapan seorang calon anggota ini dari ijazah yang dimiliki atau hasil yang dicapainya. Sistem ini dalam prakteknya yaitu penarikan anggota yang didasarkan pada kecakapan, bakat, pengalaman, kesehatan sesuai dengan kriteria yang telah dibuat sebelumnya.

Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan yang perlu di rekrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.⁵

Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik

⁵ Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik – Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia. Hal. 71

perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Bab XI mengenai Rekrutmen Politik Pasal 29 ayat (1) partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara indonesia untuk menjadi anggota partai politik; ayat (2) rekrutmen sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD dan ART serta peraturan perundang-undangan; ayat (3) penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD/ART.⁶

1.1.2. Proses Rekrutmen politik

Rekrutmen politik berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan. Baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader yang demikian yang dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Berkaitan dengan tujuan tersebut adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik, yaitu:⁷

⁶ Nuansa Aulia. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Partai Politik*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.. Hal. 23

⁷ Catur Wibowo. (2018). *Potret Rekrutmen Politik Di Indonesia*. Jakarta: INDOCAMP. Hal. 35-38

- a. Partisan, merupakan pendukung kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan.
- b. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
- c. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut, dan
- d. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seseorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Anggota kelompok yang direkrut atau diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.

1.1.3. Pola Rekrutmen

Menurut Norris dan Lovenduski dalam buku panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia mengatakan bahwa pola rekrutmen terbentuk atas hubungan antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi

yang ditetapkan oleh partai politik. Terdapat dua pola rekrutmen partai politik, yaitu:⁸

- 1) Pola vertikal, yakni rekrutmen partai yang dilakukan secara hirarki dengan jalur struktural dalam organisasi partai. Dengan pola ini, organisasi partai memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan publik. Pada umumnya partai akan memilih kader partai yang terbukti bekerja untuk partai sejak lama. Kemampuan politik seseorang akan menjadi faktor yang menentukan dalam pola vertikal. Selain itu, rekrutmen juga terhubung dengan jenjang karir organisasi, yang biasanya tidak mudah karena jenjang ini butuh waktu yang lama dan terkadang sulit dicapai. Pola ini biasanya sering disebut sebagai *merit system*. *Merit system* adalah sebuah proses rekrutmen yang didasarkan pada jenjang kaderisasi yang telah baku diterapkan pada suatu organisasi partai. Proses rekrutmen didasarkan pada keahlian, kemampuan, dan prestasi. Jenjang karier politik ditentukan atas dasar prestasi atau kinerja kader.
- 2) Pola lateral, yakni rekrutmen dibuka kepada semua individu, baik di dalam partai maupun di luar partai. Kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menantang para kader-kader senior yang telah lama berkecimpung di partai. Pola ini

⁸ Syamsuddin Haris, DKK. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedepuluan Pencegahan, KPK bekerjasama dengan P2Politik LIPI). Hal. 11-12

menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis, yang salah satunya dicirikan oleh kekuasaan yang terdesentralisasi. Proses rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan anggota potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi.

1.2. Partai Politik

1.2.1. Pengertian Partai Politik

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembati antara pemerintah dan rakyat oleh karena itu diperlukan adanya partai politik.⁹ Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggotanya untuk mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁰ Menurut Firmanzah, partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas tidak hanya

⁹ Kristina Agustina Sianturi. *Ibid.* Hal. 9

¹⁰ Miriam Budiardjo. *Ibid.* Hal. 404

berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya, perlu suatu proses pendidikan baik formal maupun non formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin dalam struktur dan sistem politik. Organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.¹¹

Menurut pendapat Surbakti mengatakan bahwa partai politik sebuah organisasi yang memerlukan anggota di dalamnya untuk menjalankan setiap program-program yang disusun berdasarkan ideologi partainya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi utama partai politik yaitu mencari anggota yang berkualitas dalam mempertahankan kekuasaannya.¹² Partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari para aktivis politik yang secara terorganisir mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama untuk memperebut kekuasaan pemerintahan melalui proses pemilihan umum, karena melalui pemilihan umum itu mereka dapat bersaing dengan golongan-golongan lain yang berbeda pandangan untuk meraih dukungan rakyat.¹³

Menurut Undang Undang No. 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Partai Politik adalah organisasi

¹¹ Firmanzah. *Ibid.* Hal.67-68

¹² Catur Wibowo. *Ibid.* Hal.6

¹³ PT Rajagrafindo Persada. (2022). *Perjalanan Dan Perkembangan Sistem Politik Indonesia Dari Masa Ke Masa: Suatu Tinjauan Selayang Pandang*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 17

yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

1.2.2. Karakteristik dan Fungsi Partai Politik

A. Karakteristik partai politik

Menurut La Palombara dan Weiner mengidentifikasi ada empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik. Keempat karakteristik dasar dari partai politik adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi dan ada mekanisme sukses yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika. (2011). *Amandemen Undang-Undang Partai Politik 2011 (UU RI No. 2 Tahun 2011)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 26

¹⁵ Firmanzah. *Ibid.* Hal.68-69

2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila di dukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal maupun sampai nasional dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, dukungan ini yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat semakin besar dukungan publik yang didapat akan semakin besar juga legitimasi yang diperoleh oleh partai politik tersebut.

Dari ke empat karakteristik diatas ini, maka bisa disimpulkan bahwa suatu partai politik harus memiliki seseorang yang mampu menjamin keberlangsungan partai

politik dalam jangka panjang, memiliki struktur organisasi yang sistematis, dan memiliki dukungan masyarakat yang luas.

B. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Secara garis besar menurut Firmanzah, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan mempertahankan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga bersifat eksternal organisasi. Disini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan Negara.¹⁶

¹⁶ Firmanzah. *Op. Cit.* Hal. 70

Sesuai dengan landasan teori partai politik dan asal usul serta perkembangannya terdapat fungsi partai politik yang dibagi menjadi empat yaitu:¹⁷

1. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan (*Interest actulation*) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (*Interest Aggregation*) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat.
2. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik, yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen partai politik akan menjamin *kontinuitas* dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.
4. Sebagai sarana pengatur konflik, konflik harus bisa dikendalikan agar tidak membahayakan *eksistensi*

¹⁷ Kristina Agustiani Sianturi. *Op.Cit.* Hal.11-15

bangsa. Partai politik harus benar-benar ada di hati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani rakyat, Serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat.

1.2.3. Tujuan Partai Politik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tertera bahwa tujuan politik dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus dari pembentukan partai politik tersebut.¹⁸

- Tujuan umum partai politik adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁸ Redaksi Sinar Grafika. *Ibid.* Hal. 28

- Tujuan khusus partai politik adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan partai politik keduanya diwujudkan secara konstitusional.

1.3. Anggota Partai Politik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2011 bab

VII tentang keanggotaan dan kedaulatan anggota tersebut ditegaskan:¹⁹

pasal 14:

- 1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah atau pernah kawin.
- 2) Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.
- 3) Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.
- 4) Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.
- 5) Anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta partisipasi dalam kegiatan partai politik.

Pasal 16:

- 1) Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c) Menjadi anggota partai politik lain; atau

¹⁹ Nuansa Aulia. *Ibid.* Hal.19

- d) Melanggar AD dan ART.
- 2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politik.
- 3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Anggaran Dasar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bab IV tentang Rekrutmen Dan Keanggotaan berbunyi:

Pasal 10:

- 1) Anggota Partai Solidaritas Indonesia adalah warga negara Indonesia yang menyetujui anggaran dasar-anggaran rumah tangga dan mempunyai kartu anggota.
- 2) Anggota Partai Solidaritas Indonesia terdiri dari anggota biasa, kader, anggota kehormatan, dan simpatisan.
- 3) Anggota biasa adalah individu yang telah mendapatkan kartu anggota namun belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh partai.
- 4) Kader adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh partai sesuai jenjang kader.
- 5) Anggota kehormatan adalah individu yang terbukti berjasa terhadap kemajuan dan perjuangan partai.
- 6) Simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap partai, mendukung tujuan partai akan tetapi belum menjadi anggota namun atas permintaan yang bersangkutan didaftar sebagai simpatisan.
- 7) Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekrutmen keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Didalam Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia bab II tentang keanggotaan yaitu:

Pasal 4 mengenai ketentuan umum menegaskan:

- 1) Setiap warga negara Republik Indonesia:
 - a) Telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b) Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- 2) Setiap warga negara yang telah memenuhi ayat 1 dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan.

- 3) Setiap Warga Negara Indonesia yang telah disetujui menjadi anggota partai akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui struktur resmi Partai di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.

Pasal 5 mengenai kewajiban anggota yaitu:

- 1) Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan partai.
- 2) Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip partai.
- 3) Membayar iuran anggota.
- 4) Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Pasal 6 mengenai hak-hak anggota yaitu:

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai lainnya.
- 2) Mempunyai hak memilih dan dipilih.
- 3) Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.
- 4) Mempunyai hak untuk membela diri.

1.4. Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia atau di singkat PSI adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No.14 Tahun 2014. Pada tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya kementerian hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Melengkapi syarat-syarat pembentukan parpol inilah yang menjadi “tugas suci” pengurus PSI di semua level kepemimpinan guna memastikan PSI lolos verifikasi Kumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016.

Partai Solidaritas Indonesia berasaskan Pancasila. Makna logo Partai Solidaritas Indonesia berlambangkan segi empat merah dengan gambar kepalan tangan menggenggam bunga mawar berwarna putih, bertuliskan PSI dengan huruf P yang terbuka. Ide bunga mawar ini terinspirasi dari kutipan pidato Soekarno tanggal 29 Juli 1956 di Semarang “Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya. Prinsip politik PSI yaitu partai modern yang terbuka, demokratis, terpimpin, berbasis *platform*, budaya partisipasi dan berkemajuan. Partai ini memiliki visi adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Salah satu misinya yaitu membangun kembali semangat *republikanisme*, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih *idealisme*, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong. Untuk mewujudkan itu semua, maka PSI akan berusaha memenuhi Hak Asasi Manusia dan hak warga negara Indonesia dan mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika.²⁰

²⁰ Grace Natalie. *Ibid.* Hal.7-11

1.5. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara rinci teoritis yang berkaitan antar variabel yang akan di teliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada *variable moderator* dan *intervening*. Maka juga dijelaskan, mengapa variabel ikut dilibatkan dalam penelitian. Berkaitan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, setiap penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir.²¹

Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan didapatkan karakteristik anggota dengan ideologi partai politiknya. Ada dua sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen. *Pertama*, sistem patronik (*patronage system*), *Kedua*, sistem merit (*merit system*). Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk di kembangkan yang perlu di rekrut dan menghasilkan anggota yang berkualitas. Maka dari itu, di analisis melalui Konsistensi dan proses rekrutmen dimana dalam partai politik menjadi salah satu proses yang cukup penting untuk menentukan baik tidaknya anggota. Terdapat proses yang harus dilakukan oleh partai politik dalam merekrut anggota partainya sesuai kebutuhan. Tujuan dilakukannya rekrutmen agar konsisten dengan sistem yang partai gunakan. Proses rekrutmen

²¹ Sugiyono. *Ibid.* Hal. 90

selalu dibutuhkan oleh setiap partai untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan ideologi partai, hal ini juga digunakan untuk meningkatkan citra sebagai partai yang berkualitas. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kerangka Pikir

